

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Menurut Bastian (2010:137-138) Pada tahun 2005, Pemerintah Pusat telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Terlepas dari kontroversi dan kelemahan yang sangat mendasar. Salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah, yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Hal tersebut diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN/APBD disusun serta disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang ditetapkan dengan pertauran pemerintah.

PSAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah Indonesia. Selain menyusun SAP, KSAP juga berwenang menerbitkan berbagai publikasi lainnya, antara lain Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (IPSAP) dan Buletin Teknis. IPSAP dan Buletin Teknis merupakan pedoman serta informasi lebih lanjut yang akan diterbitkan oleh KSAP guna memudahkan pemahaman dan penerapan SAP, serta

untuk mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah akuntansi maupun pelaporan keuangan.

2.1.1.1 Kedudukan SAP

- a. Sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, SAP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- b. Setiap entitas pelaporan pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menetapkan SAP. Pada penerapannya, muncul kebutuhan akan upaya pengharmonisan berbagai peraturan baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan SAP.

2.1.1.2 Ruang Lingkup SAP

Menurut Bastian (2010:138-140) SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Keterbatasan dari penerapan SAP akan dinyatakan secara eksplisit pada setiap standar yang diterbitkan. Proses penyiapan SAP merupakan mekanisme prosedural yang meliputi tahap-tahap kegiatan yang dilakukan dalam setiap penyusunan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) oleh Komite. Menurut Bastian (2010:138-140) SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Keterbatasan dari penerapan SAP akan dinyatakan secara eksplisit pada setiap standar yang diterbitkan. Proses penyiapan SAP

merupakan mekanisme prosedural yang meliputi tahap-tahap kegiatan yang dilakukan dalam setiap penyusunan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) oleh Komite.

2.1.1.4 Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah

Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Menurut Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Sistem Informasi Akuntansi (SIA) adalah sebuah sistem informasi menangani segala sesuatu yang berkenaan dengan akuntansi saat ini. Pemerintah telah memanfaatkan teknologi informasi yang menghasilkan suatu sistem informasi, sebagai wadah untuk menyediakan informasi mengenai keuangan daerah yang dapat diakses dikelola dan digunakan oleh berbagai pihak dan masyarakat luas.

2.1.2 Kualitas Laporan Keuangan Daerah

2.1.2.2.1 Laporan Keuangan Secara Umum

Menurut Samryn (2017:30-32) Secara umum laporan keuangan meliputi ikhtisar-ikhtisar yang menggambarkan posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas serta perubahan ekuitas sebuah organisasi dalam satu periode waktu tertentu. Tiap ikhtisar tersebut dibuat dalam satu format sendiri secara terpisah. Ikhtisar posisi keuangan tercermin dalam laporan keuangan yang disebut neraca. Laporan ini mengikhtisarkan status atau posisi sumber daya pada suatu saat tertentu.

2.1.2.2 Tujuan Laporan Keuangan Secara Umum

Secara umum laporan keuangan dibuat dengan tujuan untuk menyampaikan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan pada suatu saat tertentu kepada

para pemangku kepentingan. Para pemakai laporan keuangan selanjutnya dapat menggunakan informasi tersebut sebagai dasar dalam memilih alternatif penggunaan sumber daya perusahaan yang terbatas (Samryn, 2017:33). Namun, sejalan maka pelaporan keuangan diperluas dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Membuat keputusan investasi dan kredit, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membuat lebih dari satu laporan keuangan untuk satu periode akuntansi.
- b. Menilai prospek arus kas. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat digunakan untuk menilai potensi arus kas di masa yang akan datang. Melaporkan sumber daya perusahaan, klaim atas sumber daya tersebut dan perubahan-perubahan di dalamnya. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat menjelaskan yang terjadi atas sumber daya tersebut selama satu periode akuntansi yang dilaporkan.
- c. Melakukan sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas para pemilik.
- d. Melaporkan kinerja dan laba perusahaan. Laporan keuangan digunakan untuk mengukur prestasi manajemen dengan selisih antara pendapatan dan beban dalam periode akuntansi yang sama.
- e. Menilai likuiditas, solvabilitas dan arus dana. Laporan keuangan dapat digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan melunasi utang jangka pendek, jangka panjang dan arus dana.
- f. Menilai pengelolaan dan kinerja manajemen. Manipulasi matematis, atas nilai akun elemen laporan keuangan dapat menunjukkan arah kebijakan dan prestasi manajemen.

g. Menjelaskan dan menafsirkan informasi keuangan.

2.1.2.2 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Mahmudi (2016:02-03) Salah satu pilar utama tegaknya perekonomian suatu negara adalah adanya akuntabilitas dari pemangku kekuasaan. Istilah lain dari akuntabilitas tersebut “amanah” yang berarti pemangku kekuasaan yang akuntabel atau amanah adalah mereka yang dipercaya dan bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya publik yang dipercayakan kepadanya. Setiap Rupiah uang publik harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yang telah memberikan uangnya untuk membiayai pembangunan dan berjalannya roda pemerintahan. Dalam masyarakat yang maju peradabannya, pertanggungjawaban tersebut tidak cukup dengan laporan lisan saja, namun perlu di dukung dengan laporan pertanggungjawaban secara tertulis. Penyajian laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban tertulis atas kinerja keuangan yang telah dicapai.

Terkait dengan tugas untuk menegakkan akuntabilitas keuangan, khususnya di daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingannya, Terdapat dua alasan utama mengapa pemerintah daerah perlu mempublikasikan laporan keuangan, yaitu :

- a. Dari sisi internal, laporan keuangan merupakan pengendalian dan evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah secara keseluruhan maupun unit-unit kerja di dalamnya (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban internal (*internal accountability*),

yaitu pertanggungjawaban kepala satuan kerja kepada kepala daerah, kepala daerah kepada pegawai pemerintah daerah dan DPRD.

b. Dari sisi pemakai eksternal, laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban eksternal (*eksternal accountability*), yaitu pertanggungjawaban kepala daerah kepada masyarakat, investor, kreditor, lembaga donor, pers, serta pihak-pihak lain yang berkepentingandengan laporan tersebut sebagai dasar untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Karena laporan keuangan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, maka laporan keuangan pemerintah daerah harus disajikan secara tepat waktu dan dapat diandalkan. Selain itu laporan keuangan tersebut juga perlu dilengkapi dengan pengungkapan yang memadai (*disclosure*) mengenai informasi-informasi yang dapat mempengaruhi keputusan.

2.1.3 Tujuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Mahmudi (2016:04-05) secara laporan keuangan publikasian yang terdapat dikoran atau situs pemerintah daerah pada dasarnya mengandung informasi yang sangat berarti jika dilakukan analisis secara lebih seksama. Laporan keuangan publikasian merupakan inti sari dari data keuangan organisasi yang sudah diringkas, diklasifikasikan, dan dikelompokkan. Oleh karena itu, untuk mengetahui kondisi keuangan suatu organisasi apakah tergolong sehat atau sakit, kita dapat melihatnya dari laporan keuangannya.

Adapun secara garis besar tujuan penyajian laporan keuangan bagi pemerintah daerah adalah :

- a. Untuk memberikan informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik;
- b. Untuk alat akuntabilitas publik;
- c. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi.

2.1.3.1 Tujuan Laporan Keuangan Menurut SAP

Menurut Mahmudi (2016:05) dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan yang merupakan salah satu bagian dari Standar Akuntansi Pemerintahan, dijelaskan mengenai tujuan pelaporan keuangan pemerintah. Tujuan pelaporan keuangan tersebut adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, dan ekuitas pemerintah;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;

- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya

2.1.3.2 Manfaat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Mahmudi (2016:06-07) jika laporan keuangan publikasian itu dieksplorasikan dan ditelaah secara kritis, maka pembaca laporan akan dapat menangkap berbagai informasi penting di dalamnya. Secara spesifik, manfaat penyajian laporan keuangan adalah:

- a. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi kesehatan keuangan pemerintah terkait dengan likuiditas dan solvabilitasnya;
- b. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu pemerintahan dan perubahan-perubahan yang telah dan akan terjadi;
- c. Memberikan informasi keuangan untuk monitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan;
- d. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran;

Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional:

- a. Untuk menentukan biaya program, fungsi, dan aktivitas sehingga memudahkan analisis dan melakukan perbandingan dengan kriteria yang

telah ditetapkan, membandingkan dengan kinerja periode-periode sebelumnya, dan dengan kinerja unit pemerintah lain;

- b. Untuk mengevaluasi tingkat ekonomi, efisiensi, dan efektivitas operasi, program, aktivitas, dan fungsi tertentu di pemerintahan;
- c. Untuk mengevaluasi hasil (*outcome*) suatu program, aktivitas, dan fungsi serta efektivitas terhadap pencapaian tujuan dan target;
- d. Untuk mengevaluasi tingkat pemerataan dan keadilan (*equity & equality*).

1.1.3.4 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Mahmudi (2016:11-12) Pemerintah daerah harus berupaya memperbaiki kualitas laporan keuangannya. Laporan keuangan yang disajikan pemerintah daerah dinilai berkualitas apabila memenuhi ciri-ciri berikut:

- Relevan (*relevance*) artinya informasi dalam laporan keuangan yang disajikan memberikan manfaat bagi para pengguna untuk pengambilan keputusan. Relevansi laporan keuangan terkait dengan:
 - Laporan keuangan dapat memberikan manfaat untuk memprediksi, yaitu memprediksi kondisi keuangan, kebutuhan keuangan, dan kinerja di masa datang.
 - Laporan keuangan dapat memberikan manfaat untuk evaluasi kinerja masa lalu dan memberikan umpan balik dalam rangka perencanaan keuangan dan perbaikan kinerja di masa datang.
 - Laporan keuangan dipublikasikan tepat waktu. Laporan keuangan yang baik harus disajikan tepat waktu, sebab nilai atau manfaat suatu informasi akan berkurang jika terlambat disampaikan.

- Andal (*Reliability*) artinya informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat diandalkan, tidak menyesatkan dan mengandung unsur manipulasi. Laporan keuangan yang andal memiliki ciri berikut:
 - Disajikan secara jujur, yaitu laporan keuangan terbebas dari salah saji material dan tidak ada manipulasi laporan keuangan.
 - Dapat diverifikasi, yaitu penyajian laporan keuangan dapat diverifikasi kebenarannya melalui proses audit laporan keuangan.
 - Netral dalam penyajian, yaitu penyajian laporan keuangan tidak bersifat tendensius dan bias terhadap kepentingan kelompok tertentu.
- Dapat dibandingkan (*comparability*) artinya laporan keuangan dapat digunakan sebagai pembandingan kinerja masa lalu atau pembandingan kinerja organisasi lain yang sejenis.
- Dapat dipahami (*understandability*) artinya laporan keuangan harus memberikan informasi yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami oleh pihak-pihak pengguna laporan keuangan.

1.2 Faktor-Faktor Kualitas Laporan Keuangan

Terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang membuat peneliti tertarik melakukan penelitian ini, yaitu :

2.2.1 Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintah di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip yang diterapkan dalam

Menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang di singkat SAP. SAP diterapkan dalam lingkup pemerintahan yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah.

Standar akuntansi pemerintah menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 memuat 11 (sebelas) Pernyataaan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) sebagai pedoman dalam Menyusun dan menyajikan laporan keuangan bagi pemerintah, yaitu :

a. SAP No 01 – Penyajian Laporan Keuangan.

Standar mencakup pengertian laporan keuangan, tujuan laporan keuangan, basis akuntansi laporan keuangan, informasi yang harus disajikan laporan keuangan utama, serta entitas pelaporan diperkenankan menyajikan Laporan Kinerja Keuangan berbasis akrual dan Laporan Perubahan Ekuitas.

b. SAP No 02 – Laporan Realisasi Anggaran.

Standar mencakup pengertian laporan realisasi anggaran dan tujuan laporan realisasi anggaran. Tujuan standar Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. SAP No 03 – Laporan Arus Kas.

Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa depan, serta berguna untuk menilai kecermatan taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya. Tujuan Pernyataan Standar laporan arus kas adalah mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklarifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas akuntansi. Dan tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, pengguna, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara ks pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

d. SAP No 04 – Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Catatan atas laporan keuangan adalah catatan yang dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak hanya terbatas untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Oleh karena itu, laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, laporan keuangan harus dilengkapi dengan Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi demi memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

e. SAP No 05 – Akuntansi Persediaan.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan

barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan demi memberikan pelayanan kepada masyarakat. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, serta barang bekas pakai seperti komponen-bekas. Jika pemerintah memproduksi barang atau perlengkapan sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku membuat alat-alat pertanian. Barang hasil proses produksi yang belum selesai akan dicatat sebagai persediaan, seperti alat-alat pertanian setengah jadi. Persediaan dapat meliputi barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga pita cukai dan leges (materai), bahan baku, serta barang dalam proses/setengah jadi. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk persediaan dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

f. SAP No 06 – Akuntansi Investasi.

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah melakukan investasi karena beberapa alasan seperti memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek demi manajemen kas. Ada beberapa jenis investasi yang dapat dibuktikan dengan sertifikat atau dokumen lain yang serupa. Hakikat

investasi yang dapat berupa pembelian surat utang, baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta instrumen ekuitas. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk investasi dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

g. SAP No 07 – Akuntansi Aset Tetap.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap sering menjadi bagian utama dari aset pemerintah sehingga sangat signifikan dalam penyajian neraca. Aset yang termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya (misalnya, instansi pemerintah lainnya, universitas dan kontraktor), dan hak atas tanah. Pernyataan Standar ini mensyaratkan bahwa aset tetap harus diakui sebagai aset jika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan suatu aset dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

h. SAP No 08 – Akuntansi Kontruksi dalam Pengerjaan.

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gudang dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehan dan/atau pembangunannya membutuhkan periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi umumnya memerlukan periode waktu tertentu, yang bisa kurang

atau lebih dari satu periode akuntansi. Perolehan aset itu dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Pernyataan Standar ini memberikan pedoman untuk :

- a. Identifikasi pekerjaan yang dapat diklasifikasikan sebagai konstruksi dalam pengerjaan;
 - b. Penetapan biaya yang dikapitalisasi dan disajikan pada neraca; dan
 - c. Penetapan dasar pengakuan dan pengungkapan biaya konstruksi.
- i. SAP No 09 – Akuntansi Kewajiban.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintahan. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban pada saat pengakuan, penentuan nilai tercatat, amortisasi, dan biaya pinjaman yang dibebankan ke kewajiban tersebut.

- j. SAP No 10 – Akuntansi untuk Koreksi Kesalahan Mendasar, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa.

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa. Peristiwa Luar Biasa adalah kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas normal entitas, dan tidak diharapkan terjadi karena berada di luar kendali atau pengaruh entitas sehingga memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

- k. SAP No 11 – Akuntansi Khusus Untuk Menyusun Laporan Keuangan Konsolidasi.

Laporan keuangan konsolidasi adalah laporan keuangan yang merupakan gabungan dari semua laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal. Laporan keuangan konsolidasi terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan Konsolidasi disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasi pada unit-unit pemerintahan dalam rangka menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan dimaksud.

2.2.2 Sumber Daya Manusia

Kinerja sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu system untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Winidyaningrum, 2009). Kapasitas sumber daya manusia harus dilihat dari kemampuan untuk menghasilkan keluaran (output) dan hasil (outcome). Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, maka dari itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi yang optimal dalam upaya mencapai tujuan organisasi (Sukmaningrum, 2012).

Dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah harus memiliki sumber daya yang kompeten. Kompetensi merupakan karakteristik yang mendasari

seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Kompetensi merupakan karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan pekerjaan (Harvesi, 2005). Kompetensi dapat dilihat dari latar belakang Pendidikan, pelatihan-pelatihan dan pengalaman dibidang keuangan.

2.2.3 Pengendalian Internal

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 sistem pengendalian internal merupakan proses yang integral pada Tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang system pengendalian intern pemerintah (SPIP). Dalam PP tersebut menyebutkan bahwa tujuan SPIP bertujuan untuk memebrikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya :

1. Efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara.
2. Keandalan laporan keuangan.
3. Penggunaan asset negara.
4. Ketaatan terhadap peraturan perundnag-undangan.

2.2.4 Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi (SIA) adalah sebuah sistem informasi yang menangani segala sesuatu yang berkenaan dengan akuntansi. Saat ini pemerintah telah memanfaatkan teknologi informasi yang menghasilkan suatu sistem informasi, sebagai wadah untuk menyediakan informasi mengenai keuangan daerah yang dapat diakses, dikelola dan digunakan oleh berbagai pihak dan masyarakat luas. Dengan adanya fasilitas jaringan system informasi akuntansi yang dirancang khusus untuk proses penyusunan laporan keuangan mulai dari pencatatan jurnal, buku besar sampai kepada laporan keuangan yang telah tersistem dengan menggunakan komputerisasi diharapkan akan mengurangi tingkat kesalahan dalam perhitungan dan menghemat waktu dalam proses penyusunannya. Dengan demikian laporan keuangan yang dihasilkan dapat memenuhi informasi yang diharapkan dan mampu meningkatkan kualitas hasil dan tersedianya laporan keuangan yang tepat waktu. Adapun indikator yang digunakan menurut Yuliani dkk,2010 :

1. Relevan .
2. Tingkat keamanan .
3. Informasi dapat mendukung keputusan manajemen.
4. Dapat dipercaya.
5. Informasi akuntansi dapat terkontrol secara formil maupun material dari segi validitasnya.
6. Lengkap.

7. Informasi tidak menghilangkan data penting yang dibutuhkan oleh para pemakai.

Pada penelitian ini peneliti mengkaji lebih lanjut apakah Standar Akuntansi Keuangan Pemerintahan dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah di Kantor BKAD Kabupaten Ogan Komering Ulu.

2.1 Penelitian Sebelumnya

Aidil (2010) yaitu pemahaman tentang peraturan tidak berpengaruh signifikan secara statistic terhadap kemampuan penyusunan laporan keuangan sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran antara peraturan yang baru dan peraturan sebelumnya membuat para pegawai kesulitan dalam Menyusun laporan keuangan.

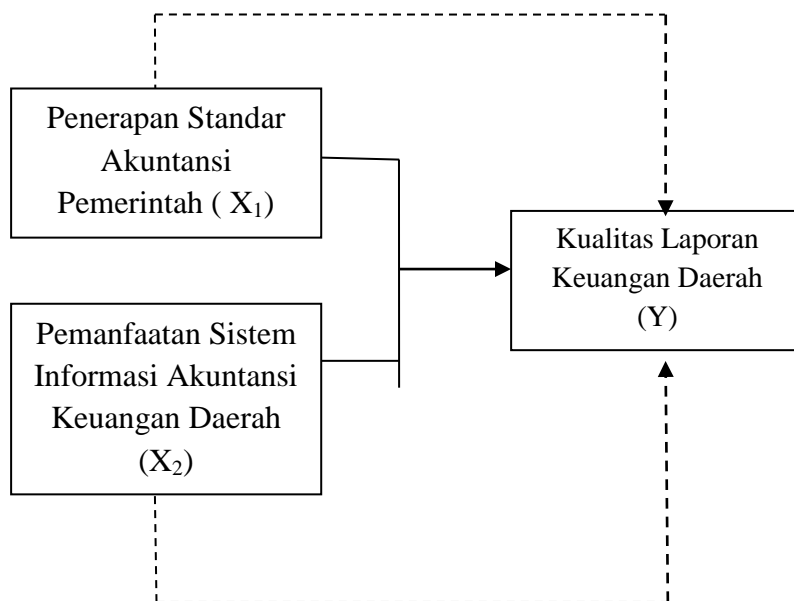
Suwanda (2015) melakukan penelitian yang berjudul “ faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah untuk mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemerintah Keuangan Republik Indonesia (BPK). Alat analisis yang digunakan dalam penelitian adalah Regresi Berganda dengan uji t. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan SAP, Implementasi Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi secara signifikan mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sementara Kualitas Sumber Daya Manusia, tidak berpengaruh secara terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Gafarov (2009) Melakukan penelitian yang berjudul "Pengendalian intern dan kualitas pelaporan keuangan. Hal baru dari disertai Gafarov (2009) adalah mengukur pelaporan keuangan dari karakteristik kualitatif informasi akuntansi. Salah satu hasil yang ditunjukkan dalam penelitiannya adalah implementasi pengendalian intern sangat penting terhadap pelaporan keuangan. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian adalah Regresi Berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengendalian intern yang baik merupakan hal penting dalam pelaporan keuangan.

Indriasari dan Naharo (2008) Melakukan penelitian pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian adalah Regresi Berganda. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia tidak mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan daerah secara signifikan, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh secara signifikan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel yang mempengaruhi yaitu Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X_1) dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (X_2) dan variabel yang dipengaruhi yaitu Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y) yang merupakan variabel yang dipengaruhi, berdasarkan hal tersebut, maka peneliti membuat kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Keterangan:

-----▶ : Secara parsial

————▶ : Secara Simultan

2.3. Hipotesis

Menurut Kuncoro (2013:59), Hipotesis merupakan suatu penjelasan sementara tentang perilaku, fenomena, keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi. Hipotesis merupakan pernyataan peneliti tentang hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian, serta merupakan pernyataan yang paling spesifik. Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah diduga terdapat pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas laporan keuangan daerah baik secara parsial maupun secara simultan